Pelaksanaan Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan Pelaku Melakukan Perkebunan Tanpa Izin Menteri Di Kawasan Hutan cagar Biosfer

Andi Manopo 1^a

^aPolisi Republik Indonesia, Email: andi.manopo1906@gmail.com

ArticleInfo

Article History:

Received : 01-10-2021

Revised : 20-01-2021

Accepted : 10-02-2021

Published : 28-05-2021

Keywords:

Keyword Biosphere reserve area

Keyword Forest

Keyword Plantation

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 01-10-2020

Direvisi : 20-01-2021

Disetujui : 10-02-2021

Diterbitkan : 28-05-2021

Kata Kunci:

Kata Kunci Kawasan Cagar Biosfer

Kata Kunci Hutan

Kata Kunci Perkebunan

Abstract

How is the implementation of the Prevention and Eradication of Forest Destruction against actors who carry out plantation activities without the minister's permission in the Giam Siak Kecil Biosphere Reserve Forest Area? What are the obstacles and efforts made to overcome the obstacles faced regarding the implementation of prevention and eradication of forest destruction against actors who carry out plantation activities without ministerial permission in the Giam Siak Kecil Biosphere Reserve Forest Area? The type of research that the authors do in this study is the type of sociological legal research, the use of resources in the Giam Siak Kecil Biosphere Reserve is basically an interaction of internal and external factors that are very complex and show the inability of the authority of the Giam Siak Kecil Biosphere Reserve to manage its area. so that there are various disturbances and threats with a low to high level. Protection issues in the Giam Siak Kecil Biosphere Reserve include issues of biodiversity, stabilization of the area, utilization of the area and environmental services, and organization..

Abstrak

Bagaimanakah pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan terhadap pelaku yang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di Kawasan Hutan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil? Bagaimanakah hambatan dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi mengenai pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan perusakan hutan terhadap pelaku yang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di Kawasan Hutan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil? Adapun jenis penelitian yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis, Pemanfaatan sumber daya di Kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil pada dasarnya merupakan interaksi dari faktor internal dan eksternal yang sangat kompleks dan menunjukkan ketidakmampuan otoritas Kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil dalam mengelola kawasannya sehingga muncul berbagai gangguan dan ancaman dengan tingkat yang rendah sampai tinggi. Permasalahan perlindungan di Kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil mencakup permasalahan keanekaragaman hayati, pemantapan kawasan, pemanfaatan kawasan dan jasa lingkungan, serta organisasi

PENDAHULUAN

Memasuki masa modern dimana teknologi dan informasi semakin canggih, membuat manusia lebih berperan sebagai subyek bagi dirinya sendiri. Manusia mulai menguasai dan mengeksplorasi alam untuk kepentingan pribadi, inilah yang menjadi ciri sikap Anthropocentris.¹ Akibat nyata yang timbul kemudian adalah rusaknya lingkungan yang pada akhirnya merugikan manusia itu sendiri.²

Cagar Biosfer adalah ekosistem daratan dan pesisir atau laut atau kombinasi lebih dari satu tipe ekosistem, yang secara internasional diakui keberadaannya sebagai bagian dari *Man And Biosphere* (MAB) Programme UNESCO sesuai dengan kerangka hukum.³ Manfaat terpilihnya kawasan ini menjadi cagar biosfer adalah perlindungan dan pemeliharaan keanekaragaman hayati didukung oleh masyarakat internasional dengan adanya skema bantuan pendanaan.⁴

Tujuan cagar biosfer bukan hanya sekedar pelestarian keanekaragaman hayati, namun juga untuk mengembangkan sosial, ekonomi, budaya masyarakat (kawasan penyangga) disekitarnya. Pengembangan kawasan penyangga tersebut perlu dilakukan secara selaras dengan fungsi konservasi cagar biosfer. Cagar biosfer berdasarkan *strategi Seville* merupakan situs terpilih untuk menguji, memperbaiki, mendemonstrasikan dan melaksanakan tujuan tersebut.⁵

Secara fisik, setiap cagar biosfer harus terdiri atas tiga elemen, yaitu: pertama zona inti, yang merupakan kawasan dilindungi bagi konservasi keanekaragaman hayati, pemantauan ekosistem yang mengalami gangguan, dan melakukan kegiatan penelitian yang tidak merusak serta kegiatan lainnya yang berdampak rendah (seperti pendidikan); kedua zona penyangga yang mengelilingi atau berdampingan dengan zona inti, dan

¹ Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution*, rev. cet-11, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 118.

² Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakkan Hukum Lingkungan Indonesia*, Edisi Revisi, (Bandung: PT. Alumni, 2010), hlm. 19.

³ Suparto Wijoyo, *Hukum Lingkungan, Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2011), hlm. 1.

⁴ Haris Gunawan, *Melihat Sedekat Mungkin Cagar Biosfer*, (Bandung: Refika Cipta, 2012), hlm. 43.

⁵ Widjoyo, *Refleksi Mata Rantai Pengaturan Hukum Pengelolaan Lingkungan Secara Terpadu*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2010), hlm. 166.

dimanfaatkan bagi kegiatan-kegiatan kerjasama yang tidak bertentangan secara ekologis, termasuk pendidikan lingkungan, rekreasi, ekoturisme dan penelitian terapan dan dasar; dan ketiga zona transisi, atau zona peralihan, yang dapat berisi kegiatan pertanian, pemukiman dan pemanfaatan lahan lainnya. Di Zona transisi masyarakat, lembaga penelitian, LSM, masyarakat adat dan pemangku kepentingan lainnya dapat bekerjasama untuk mengelola dan mengembangkan sumberdaya secara berkelanjutan.⁶

Zonasi yang dikembangkan meliputi area inti, zona penyangga, dan area transisi. Badan Koordinasi Pengelolaan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil telah dibentuk tetapi belum bekerja optimal dalam menyelenggarakan koordinasi dan komunikasi antar *stakeholders*, sehingga belum ada sinergi program dan kegiatan pada masing-masing zona. Kemitraan antara BKSDA Riau dengan SMF untuk mengoptimalkan fungsi area inti sudah berjalan, tetapi kemitraan dengan pemerintah daerah dan sektor swasta lainnya untuk pengelolaan daerah penyangga dan area transisi belum terwujud.

Sebagaimana tercantum di dalam Pasal 17 Ayat (2) huruf (b) Jo92 ayat (1) huruf (a) yang isinya menjelaskan bahwa: “*setiap orang dilarang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan*”. Sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi: *Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan.*⁷

Namun yang terjadi adalah masyarakat yang tinggal berada di Desa Tasik Serai Barat Kecamatan Tualang Mandau Kabupaten Bengkalis melakukan perkebunan di kawasan Cagar Biosper Giam Siak. Di mana masyarakat tersebut, tanpa adanya kepemilikan surat di dalam mengelola perkebunan belum mendapatkan izin melakukan kegiatan perkebunan. Masyarakat memiliki lahan tersebut dasarnya hanya kuitansi jual beli selanjutnya dasar surat tersebut dikeluarkan yang diketahui oleh RT/RW, Kepala Dusun dan diketahui oleh Kepala Desa Tasik Serai Barat. Dengan demikian Kawasan Cagar Biosper Giam Siak Kecil adalah belum sesuai kriteria cagar biosfer. Pemanfaatan lahan disekitar Kawasan Cagar Biosper Giam Siak Kecil cenderung berkembang kegiatan yang kurang sesuai dengan fungsi konservasi Kawasan Cagar Biosper Giam Siak Kecil.

⁶*Ibid.*

⁷ Y. Purwanto dan P.S Ajiningrum, *Journal Lore Lindu; Pengeolaan Kawasan Konservasi Bagi Pembangunan Ekonomi Secara Berkesinambungan*, GDLHUB, Surabaya, 2015, hlm. 21.

Disamping itu juga terjadi berbagai berbagai ancaman serius bagi Kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil seperti penangkapan satwa, pembalakan liar, dan kebakaran hutan.

Rusaknya Cagar Biosfer Giam Siak berpengaruh luas terhadap lingkungan sekitarnya. Pencemaran udara yang sangat berbahaya akibat asap kebakaran mengganggu kesehatan penduduk dan aktivitas sehari-hari. Kegiatan eksploitasi hutan, kebakaran hutan, pendudukan tanah hutan, perladangan berpindah merupakan bentuk-bentuk kegiatan yang dapat menimbulkan dampak kerusakan lingkungan hidup.⁸ Untuk itu diperlukan tanggung jawab semua umat manusia untuk memelihara kelestarian lingkungan hidup secara global.⁹ Pertanggungjawaban dalam konteks ini juga berarti suatu kebebasan bertindak untuk melaksanakan tugas yang dibebankan, tetapi pada akhirnya tidak dapat melepaskan diri dari hasil yang harus diperoleh dari kebebasan bertindak, berupa penuntutan untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya.¹⁰

Adapun berdasarkan prapenelitian penulis bahwa adanya laporan yang masuk di Polsek Pinggir terkait perusakan hutan terhadap pemanfaatan hutan di Kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil:

1. LP/61/III/ 2014/18 Maret 2014, yang dilakukan oleh Tomson Simanjuntak Bin Artenius Durin Stumer.
2. LP/ 62/ III/2014/18 Maret 2014, yang dilakukan oleh Togar Simanjuntak Bin Arsenius.
3. LP/ 63 / III /2014/18. Maret 2014, yang dilakukan oleh Umar Ama Bin Jantan.

Berdasarkan latar belakang, penulis menyimpulkan Bagaimanakah pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan terhadap pelaku yang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di Kawasan Hutan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil? Bagaimanakah hambatan yang dihadapi mengenai pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan terhadap pelaku yang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di Kawasan Hutan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil? Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi

⁸ Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, (Bandung: Rineka Cipta, 2012), hlm. 15.

⁹ Djanius Djamin, *Pengawasan Dan Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2015), hlm. 4.

¹⁰ Sutarto, *Encyclopedia Administrasi XXVII*, (Jakarta: Gramedia Utama, 2013), hlm. 291.

mengenai pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan perusakan hutan terhadap pelaku yang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di Kawasan Hutan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil? Adapun jenis penelitian yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis yang membahas tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan perusakan hutan terhadap pelaku yang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di Kawasan Hutan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil.¹¹

PENEGAKKAN HUKUM PERUSAKAN LINGKUNGAN

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan secara ketat yang diatur dalam kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian sendiri.¹² Menurut Simons, perbuatan tindak pidana” suatu tindakan atau perbuatan melanggar hukum yang ada dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya tersebut oleh Undang-Undang yang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”.¹³

Dengan demikian suatu perbuatan yang dikategorikan dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan ancaman hukuman pidana penjara maupun denda. Terhadap perbuatan yang berkaitan dengan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang telah tegas telah dijelaskandan diatur dalam undang-undang dan telah diancam hukuman pidana bagi yang melanggarnya.

Di dalam Ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP terkadang asas *lex specialis derogate leg generalis* yang merupakan suatu asas hukum yang mengandung makna bahwa aturan yang bersifat khusus (*specialis*) mengesampingkan aturan yang bersifat umum (general).

Berkaitan dengan hal di atas, salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus (*specialis*) yaitu penegakan hukum di bidang lingkungan hidup. Menurut Niniek Suparmi, penegakan hukum lingkungan hidup adalah suatu upaya untuk mencapai

¹¹ Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Tahun 2019.

¹² Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum Pidana*, cet. Revisi ke-4, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 29.

¹³ P. A.F. Laminating, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, cet. Revisi iii, (Bandung: Citra Aditya, 2010), hlm. 185.

ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan sanksi secara administrasi, keperdataan dan pemidanaan.¹⁴

Hutan adalah suatu wilayah yang memiliki banyak tumbuh-tumbuhan lebat yang berisi antara lain pohon, semak, paku-pakuan, rumput, jamur dan lain sebagainya serta menempati daerah yang cukup luas. Hutan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida (*carbon dioxide sink*), habitat hewan, modulator arus hidrologika, dan pelestari tanah serta merupakan salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting. Hutan adalah bentuk kehidupan yang tersebar di seluruh dunia. Kita dapat menemukan hutan baik di daerah tropis maupun daerah beriklim dingin, di dataran rendah maupun di pegunungan, di pulau kecil maupun di benua besar.¹⁵

Cagar Alam adalah Kawasan suaka alam yang memiliki kekhasan akan tumbuhan dan ekosistem tertentu yang harus dilindungi atau dilestarikan dan perkembangannya berlangsung secara alami sesuai dengan kondisi aslinya, flora dan fauna yang terdapat di dalamnya dapat digunakan untuk keperluan di masa sekarang dan yang akan datang. Cagar alam memiliki nilai yang sangat penting untuk pengembangan penelitian, pendidikan, ilmu pengetahuan dan kepentingan lainnya. Adapun karakteristik yang menjadi penentuan kawasan cagar alam diantaranya sebagaimana di bawah ini:¹⁶

1. Memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar yang tergabung dalam suatu tipe ekosistem
2. Mempunyai kondisi alam, baik tumbuhan dan satwa liar yang secara fisik masih asli dan belum terganggu;
3. Terdapat komunitas tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya yang langka dan keberadaannya terancam punah;
4. Memiliki formasi biota tertentu dan unit-unit penyusunan;
5. Mempunyai luas yang cukup dan bentuk tertentu yang dapat menunjang pengelolaan secara efektif dan menjamin berlangsungnya proses ekologis secara alami;

¹⁴ Niniek Suparmi, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*, cet. Revisi iv, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 160.

¹⁵ Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Edisi Revisi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 217.

¹⁶ Alam Setia Zain, *Op. Cit.*, hlm. 2.

6. Mempunyai ciri khas potensi dan dapat merupakan contoh ekosistem yang keberadaannya memerlukan konservasi.

Dan tujuan cagar alam yaitu untuk melindungi ekosistem yang terdapat di wilayah cagar alam tetap lestari dan tidak punah. Manfaat dan fungsi cagar alam diantaranya seperti berikut:¹⁷

1. Untuk melestarikan flora dan fauna.
2. Untuk melindungi flora dan fauna dari kepunahan.
3. Untuk menjaga kesuburan tanah.
4. Dapat dijadikan sebagai tempat wisata.
5. Untuk mengatur tataan air.
6. Cagar alam dapat menambah devisa Negara.
7. Dapat menjadi praktek belajar atau praktek di lapangan.
8. Dapat menjadi penelitian.

Sedangkan di Indonesia, cagar alam adalah bagian dari kawasan konservasi (Kawasan Suaka Alam), maka kegiatan wisata atau kegiatan lain yang bersifat komersial, tidak boleh dilakukan dalam area cagar alam. Sebagaimana kawasan konservasi lainnya, untuk memasuki cagar alam diperlukan SIMAKSI (Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi). SIMAKSI bisa diperoleh di kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) setempat. Dengan dibangunnya cagar alam maka sumber daya alam berupa flora dan fauna dapat dilindungi dengan baik oleh Negara.¹⁸

Perlindungan terhadap tanah kawasan cagar alam. Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang bertujuan untuk mengambil bahan-bahan galian yang dilakukan di dalam kawasan cagar alam, diberikan oleh instansi yang berwenang setelah mendapat persetujuan Menteri. Di dalam kawasan cagar alam dilarang melakukan pemungutan hasil cagar alam

¹⁷ Mappatoba Sila, *Perlindungan dan Pengamanan Hutan*, (Hasanuddin: Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin, 2012), hlm. 2-5.

¹⁸ Pramudianto, Andreas, *Kawasan Cagar Alam dalam Konsep Hukum Global dan Keberadaannya di Indonesia*, Jurnal Lingkungan dan Pembangunan, Vol. 14, No. 1, 2014, hlm. 20.

dengan menggunakan alat-alat yang tidak sesuai dengan kondisi tanah dan lapangan atau melakukan perbuatan lain yang dapat menimbulkan kerusakan cagar alam dan tegakan.¹⁹

Perlindungan terhadap Kerusakan Cagar Alam. Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon-pohon dalam kawasan tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan selain dari petugas-petugas kehutanan atau orang-orang yang karena tugasnya atau kepentingannya dibenarkan berada di dalam kawasan cagar alam, siapapun dilarang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk memotong, berburu, dan membelah pohon di dalam kawasan. Perlindungan Terhadap Hasil Cagar Alam. Untuk melindungi hak-hak Negara yang berkenaan dengan hasil cagar alam, maka terhadap semua hasil cagar alam harus diadakan pengukuran dan pengujian. Untuk membuktikan sahnya cagar alam dan telah dipenuhinya kewajiban-kewajiban pungutan Negara yang dikenakan terhadapnya hingga dapat digunakan atau diangkut, maka hasil cagar alam tersebut harus mempunyai surat keterangan sahnya hasil cagar alam.²⁰

Perlindungan cagar alam merupakan suatu upaya untuk menjaga, melindungi dan mempertahankan cagar alam dari berbagai gangguan yang dapat mengganggu dan merusak sumber daya alam yang ada di dalamnya seperti flora dan fauna, biota laut, ekosistem, habitat, tata air dan lain-lain. Perlindungan cagar alam hanya mungkin dilaksanakan jika direncanakan dengan baik dan benar dengan mengakomodir dan merefleksi potensi atau daya dukung dari sumber daya hutan yang menjadi obyek perlindungan.²¹

Dalam rangka pencegahan perusakan hutan, Pemerintah membuat kebijakan berupa: koordinasi lintas sektor dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan; pemenuhan kebutuhan sumber daya aparatur pengamanan hutan; insentif bagi para pihak yang berjasa dalam menjaga kelestarian hutan; peta penunjukan kawasan hutan dan/atau koordinat geografis sebagai dasar yuridis batas kawasan hutan; dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.²² Selain membuat kebijakan upaya pencegahan perusakan hutan dilakukan melalui penghilangan kesempatan dengan meningkatkan peran serta masyarakat. Pemerintah dan Pemerintah

¹⁹ Nandika Dodi, *Hutan Bagi Ketahanan Nasional*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2015), hlm. 1.

²⁰ Gusti Bagus Arjana, *Geografi Lingkungan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 21.

²¹ *Ibid.*

²² Siran S. A., *Pola Pengelolaan Hutan Tropika, Alternatif Pengelolaan Hutan yang Selaras dengan Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Bayu Indra Grafika, 2014), hlm. 165.

Daerah berkewajiban melakukan pemberantasan perusakan hutan. Pemberantasan perusakan hutan dilakukan dengan cara menindak secara hukum pelaku perusakan hutan, baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya. Tindakan secara hukum meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana perusakan hutan dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku.²³

Perbuatan perusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 meliputi kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi. secara terorganisasi disini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan.

Kelompok terstruktur tidak termasuk kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.

Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Terhadap Pelaku yang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin meteri Di Kawasan Hutan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil.

Cagar biosfer Giam Siak Kecil Bukit Batu memiliki keunggulan sebagai hutan rawa gambut terbesar di dunia. Ekosistem hutan rawa gambut mempunyai variasi kekayaan jenis fauna tersendiri yang langka dan masih terlindungi.

Saat ini masih terjadi kegiatan perambahan yang berupa penebangan liar, dan pengrusakan hutan dengan mengalih fungsikan hutan menjadi lahan perkebunan hortikultura (budidaya tanaman) yang dilakukan oleh masyarakat yang berada di sekitar

²³ Salman Luthan, *Asas dan Kriteria Kriminalisasi*, Jurnal Hukum Lingkungan, Vol. 16 No. 1 Januari 2016, hlm. 8

kawasan hutan lindung tersebut. Sebagian besarnya masyarakat menggunakan lahan hutan kemudian mengelolanya untuk tempat kegiatan bercocok tanam dengan berkebun.

Tidak jarang pemanfaatan hutan disalahgunakan oleh beberapa orang maupun dalam bentuk korporasi, perbuatan tersebut menyebabkan kerusakan hutan. Pohon-pohon ditebang tanpa ijin mengakibatkan berkurangnya luas hutan, terjadinya bencana alam. Orang perseorangan atau korporasi melakukan perambahan hutan dengan cara di tebang, maupun dengan alat-alat berat yang disewa melalui perorangan atau badan hukum.

Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.

Zona penyangga di Kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil merupakan kawasan hutan tanaman industri yang menjadi hak konsesi. Zona penyangga tersebut ditanami pohon akasia sebagai sumber bahan baku utama *pulp and paper*. Sebagai pemegang hak konsesi kawasan penyangga, perusahaan tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab dan usaha untuk menjaga kawasan dari bahaya kerusakan lingkungan akibat *illegal logging* maupun kebakaran hutan. Kawasan penyangga juga berfungsi sebagai barrier terhadap masuknya aktivitas masyarakat ke dalam zona inti konservasi yang dapat merusak hutan primer di dalam zona tersebut.

Pemanfaatan sumber daya di Kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil pada dasarnya merupakan interaksi dari faktor internal dan eksternal yang sangat kompleks dan menunjukkan ketidakmampuan otoritas Kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil dalam mengelola kawasannya sehingga muncul berbagai gangguan dan ancaman dengan tingkat yang rendah sampai tinggi. Permasalahan perlindungan di Kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil mencakup permasalahan keanekaragaman hayati, pemantapan kawasan, pemanfaatan kawasan dan jasa lingkungan, serta organisasi

Menurut Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan XIX Pekanbaru terhadap pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan terhadap pelaku yang melakukan

kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di kawasan Hutan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil:²⁴

1. Dalam hal pengawasan hutan kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil yang mengatur adalah Kementerian Kehutanan dengan menunjuk instansi yang terkait.
2. Telah dilakukan dengan memasang patok menetapkan bahwa lokasi yang dimaksud masuk kedalam kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil.

Namun dalam pelaksanaannya dilapangan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan XIX Pekanbaru terhadap pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan terhadap pelaku yang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di kawasan Hutan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil adanya beberapa kendala yang terjadi dilapangan.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara bersama Kanit Reskrim Polsek Pinggir atau Penyidik terhadap pelaksanaan Undang undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan terhadap pelaku yang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di kawasan Hutan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil Tahun 2013

1. Berdasarkan hasil penyelidikan dan Penyidikan Kasus Tindak Pidana terhadap pelaku yang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di kawasan Hutan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil oleh pihak Kepolisian Sektor Pinggir belum efektif atau tidak terlaksana sepenuhnya.
2. Bahwa pihak Kepolisian dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan Kasus Tindak Pidana terhadap pelaku yang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di kawasan Hutan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil oleh pihak Kepolisian Sektor Pinggir harus adanya Delik aduan / Laporan Polisi.
3. Bahwa kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di kawasan hutan Cagar Biosfer Giam Siak kecil didasari berupa memperjual belikan lahan dengan maksud membuat desa pemekaran untuk perkembangan Desa, serta dalam proses jual beli lahan dikawasan

²⁴ Hasil wawancara Peneliti dengan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan XIX Pekanbaru oleh Bapak Muhammad Fadli, ST., pada tanggal 22 April 2020 di Pekanbaru. Melalui Media Telekomunikasi No Hp: 081328677724

hutan Cagar biosfer Giam Siak kecil ini pelaku mengeluarkan Surat Keterangan tanah (SKT) oleh Aparat Desa setempat.

Namun dalam pelaksanaannya dilapangan, Pihak Penyidik dari Kepolisian Sektor Pinggir terhadap pelaksanaan Undang undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pelaksanaan tentang pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dikawasan Cagar Biosfer Giam siak Kecil adanya beberapa kendala dilapangan.²⁵

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara bersama Camat Talang Muandau, menurut beliau kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil ini sudah dirambah oleh masyarakat yang umumnya bermukim di sekitaran kawasan hutan atau masyarakat di luar kawasan hutan tersebut sudah cukup luas, untuk wilayah Camat Talang Muandau saja menurut perkiraan beliau umumnya kegiatan pengalih fungsian tersebut hanya menjadi lahan perkebunan hortikultura milik masyarakat.

Menurut Kepala Desa terkait pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan terhadap pemanfaatan hutan di kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil yakni:

1. Pengelolaan cagar biosfer dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam proses perencanaan hingga pengambilan keputusan dan penyelesaian permasalahan dalam rangka pengembangan yang berkelanjutan.
2. Konsep cagar biosfer telah mengalami perkembangan pesat, yaitu dari kawasan yang semula fokus utamanya konservasi berubah menjadi perpaduan antara konservasi dan pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui peningkatan kerjasama antar pemangku kepentingan (*collaborative management*).²⁶
3. Telah mengalami gangguan, baik penebangan liar maupun perambahan lahan untuk pembukaan ladang dan pemukiman.²⁷

²⁵ Hasil wawancara Peneliti dengan Kanit Reskrim Polsek Pinggir oleh Bapak IPDA Yopi Ferdian, SH., MSi, pada tanggal 22 April 2020 di Polsek Pinggir.

²⁶ Hasil wawancara Peneliti dengan Kepala Desa Tasik Serai Barat oleh Bapak Ruslan. J, pada tanggal 23 April 2020 di Tasik Serai Barat.

²⁷ Hasil wawancara Peneliti dengan Kepala Desa Tasik Serai Timur oleh Bapak Erwin Siahaan, pada tanggal 23 April 2020 di Tasik Serai Timur.

Namun menurut kepala desa didalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan. Dengan demikian hal ini dapat dinilai belum berjalan sebagaimana mestinya.

Menurut tokoh masyarakat Kecamatan Talang Muandau terkait mengenai pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan terhadap pemanfaatan hutan di kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil yakni:

1. Lahan yang termasuk kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil dikelola oleh masyarakat tempatan.²⁸
2. Bahwa untuk menghindari terjadinya kerusakan lingkungan, dalam proses penyusunan perencanaannya dilibatkan pihak-pihak yang terkait mengenai permasalahan ini.²⁹

Hambatan Yang Dihadapi Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Perusakan Hutan Terhadap Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil

Cagar biosfer memiliki tiga fungsi yang saling menunjang, yaitu: a) fungsi konservasi, untuk melestarikan sumber daya genetik, jenis, ekosistem dan lansekap; b) fungsi pembangunan, untuk memacu pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia; dan c) fungsi pendukung logistik, untuk mendukung kegiatan penelitian dan pendidikan serta pelatihan lingkungan yang berhubungan dengan permasalahan konservasi dan pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal, nasional dan dunia.

Keberadaan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil di Kabupaten Siak dan Kabupaten Bengkalis sudah tidak terjaga keasliannya. Sebabnya, kawasan hutan warisan dunia itu sudah rusak karena terjarah sejak tahun 2002 dan anehnya pemerintah yang punya kewenangan terkesan membiarkannya hingga bertahun-tahun. Adanya terjadi pembalakan liar secara besar-besaran di kawasan hutan yang dilindungi itu, hal ini dinilai tidak ada upaya pemerintah mencegahnya.

²⁸ Hasil wawancara Peneliti dengan Tokoh Agama oleh Bapak Hendrik Sitompul pada tanggal 23 April 2020 di Kecamatan Talang Muandau.

²⁹ Hasil wawancara Peneliti dengan Lembaga Adat Melayu oleh Bapak Albamin pada tanggal 23 April 2020 di Kecamatan Talang Muandau.

Kasus perusakan dan atau pencemaran lingkungan ini adalah sangat berbahaya bagi kesejahteraan umat manusia. Perusakan atau pencemaran terhadap sumber daya hayati, maupun nonhayati akan menyebabkan habisnya atau punahnya sumber daya tersebut, dan kalau ini terjadi yang rugi bukan satu dua orang saja melainkan seluruh umat manusia di bumi ini. Aspek penegakan hukum memerlukan perhatian dan aksi pemberdayaan secara maksimal.

Menurut Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan XIX Pekanbaru hambatan yang dihadapi mengenai pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan terhadap pelaku yang melakukan kegiatan perekebunan tanpa izin menteri di kawasan Hutan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil:³⁰

1. Terkendalanya oleh ahli pemetaan dimana pemetaan tersebut harus berdasarkan ahli yang ada di BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan) yang disebabkan oleh keterbatasan personil ahli yang ada di BPKH.
2. Terkendala dikarenakan luasnya kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil dan juga kekurangan personil dilapangan dalam pemasangan patok kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil, sehingga tidak maksimalnya dalam pelaksanaannya.
3. Lahan kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil terlanjur telah dikelola masyarakat pemerintahan setempat.

Menurut Kanit Reskrim Polsek Pinggir selaku Penyelidik dan penyidik Kepolisian hambatan yang dihadapi mengenai pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan terhadap pelaku yang melakukan kegiatan perekebunan tanpa izin menteri di kawasan Hutan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil:³¹

1. SDM (Sumber Daya Manusia) Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Pinggir IPDA YOPI FERDIAN SH. MSi, menyatakan bahwa salah satu hambatan dalam pelaksanaannya penyidikan adalah kurangnya pesonil Penyidik maka jumlah penyidik tidak mendukung dalam pelaksanaan penyidikan yang efisien.

³⁰ Hasil wawancara Peneliti dengan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan XIX Pekanbaru oleh Bapak Muhammad Fadli, ST, pada tanggal 22 April 2020 di Pekanbaru.

³¹ Hasil wawancara Peneliti dengan Kanit Reskrim Polsek Pinggir oleh Bapak IPDA Yopi Ferdian, SH., MSi, pada tanggal 22 April 2020 di Polsek Pinggir.

2. Tidak efektifnya kerja sama dengan Pegawai PPNS, yang mana pihak kepolisian melakukan kerjasama dengan kementerian Lingkungan hidup. PPNS yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Lingkungan Hidup atau BPKH IX Pekanbaru dan Kehutanan dalam hal penyidikan ini kurang efektif dalam melakukan kerjasama dalam penegakan hukum.
3. Kurangnya Anggaran, Kurangnya anggaran Dalam pelaksanaan Penyidikan kasus Pidana yang berakibatkan sulitnya menghadirkan Saksi Ahli Untuk Melakukan Penyidikan Kasus Tindak Pidana Pelaku yang melakukan kegiatan perkebunan dikawasan Hutan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil.

Menurut Camat Talang Muandau, menurut beliau hambatan yang dihadapi mengenai pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan terhadap pemanfaatan hutan di kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil yakni dikarenakan lemahnya pemantauan kegiatan dan pelanggaran masyarakat disekitar hutan, terutama dalam aspek pemanfaatan lahan dan yang tinggal adalah masyarakat tempatan sehingga mereka memanfaatkan hasil hutan kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka serta pemahaman yang salah terhadap lahan hutan menjadi salah satu akar masalah dari permasalahan konflik. Hal ini bisa terjadi antara lain karena masyarakat menganggap tanah adalah milik keluarga, leluhur atau kelompok masyarakat pendahulu yang telah mendiami lahan sejak lama. Pemahaman tentang pertanahan yang salah, dan adanya anggapan bahwa tanah yang sudah lama dikelola pada suatu saat akan diberikan haknya oleh pemerintah menjadi sebab konflik tenurial.³²

Menurut Kepala Desahambatan yang dihadapi mengenai pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan terhadap pemanfaatan hutan di kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil:

1. Tidak adanya tapal batas kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil.³³

³² Hasil wawancara Peneliti dengan Camat Talang Muandau oleh Bapak Drs. Nasrizal, pada tanggal 22 April 2020 di Kecamatan Talang Muandau

³³ Hasil wawancara Peneliti dengan Kepala Desa Tasik Serai oleh Bapak Sabar Manurung, pada tanggal 23 April 2020 di Desa Tasik Serai Timur.

2. Ketidaktahuan masyarakat tempatan selama ini yang dilakukan bahwa tanah yang dikelola dan dijadikan perkebunan serta pemanfaatan hasil hutan tersebut adalah merupakan kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil.³⁴
3. Tidak pernah dilibatkan oleh dinas yang terkait untuk menentukan tapal batas kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil.³⁵

Menurut tokoh masyarakat Kecamatan Talang Muandau, hambatan yang dihadapi mengenai pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan terhadap pemanfaatan hutan di kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil:

1. Lahan yang termasuk kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil dikelola oleh masyarakat tempatan.³⁶
2. Ketidakjelasan batas lahan, terutama diantara kawasan konservasi dengan kawasan pemukiman, ladang dan atau lahan dengan status hak kelola lainnya.³⁷

Selanjutnya adapun menurut dari masyarakat yang melakukan pelanggaran mengenai pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan terhadap pemanfaatan hutan di kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil yakni:

1. Dengan alasan tidak mengetahui kalau tanah yang dikelola selama ini termasuk ke dalam kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil³⁸
2. Bahwa ini adalah merupakan mata pencaharian masyarakat tempatan untuk memenuhi kebutuhan hidup dikarenakan sudah tinggal lama di tempat tersebut.³⁹

³⁴ Hasil wawancara Peneliti dengan Kepala Desa Tasik Serai Barat oleh Bapak Ruslan. J, pada tanggal 23 April 2020 di Tasik Serai Barat.

³⁵ Hasil wawancara Peneliti dengan Kepala Desa Tasik Serai Timur oleh Bapak Erwin Siahaan, pada tanggal 23 April 2020 di PekanbaruTasik Serai Timur.

³⁶ Hasil wawancara Peneliti dengan Tokoh Agama oleh Bapak Hendrik Sitompul pada tanggal 23 April 2020 di Kecamatan Talang Muandau.

³⁷ Hasil wawancara Peneliti dengan Lembaga Adat Melayu oleh Bapak Albamin pada tanggal 23 April 2020 di Kecamatan Talang Muandau.

³⁸ Hasil wawancara Peneliti dengan Masyarakat Yang Melakukan Pelanggaran oleh Bapak Tomsom Simanjuntak, pada tanggal 23 April 2020 di Tasik Serai Barat Kecamatan Talang Muandau.

³⁹ Hasil wawancara Peneliti dengan Masyarakat Yang Melakukan Pelanggaran oleh Bapak Togar Simanjuntak pada tanggal 23 April 2020 di Tasik Serai baratKecamatan Talang Muandau.

3. Merupakan kaum pendatang sehingga masyarakat yang melakukan pelanggaran tidak mengetahui bahwa lahan tersebut atau kawasan tersebut termasuk ke dalam kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil.⁴⁰

Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Yang Dihadapi Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Perusakan Hutan Terhadap Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil

Pengelolaan hutan yang diintegrasikan secara luas dalam pembangunan wilayah telah diperkenalkan dengan telah ditetapkannya kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil. Dalam pelaksanaan cagar biosfer, penyelesaian konflik lahan menjadi salah satu aspek penting yang harus dilaksanakan. Hal ini tidak saja penting bagi masyarakat, terutama dalam menjamin pelaksanaan kegiatan ekonomi masyarakat, tetapi juga kepastian usaha bagi pemegang izin usaha. Konflik lahan, terutama yang terjadi di area zona inti dan zona penyangga berpotensi untuk mengganggu kinerja cagar biosfer. Dalam konteks ini, pemecahan permasalahan lahan diharapkan dapat mengurangi laju deforestasi dan degradasi hutan.

Keberadaan kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil memainkan peran penting dari konservasi keanekaragaman hayati, dan secara keseluruhan adalah bagian dari simpul-simpul konservasi dan pembangunan berkelanjutan nasional. Meskipun kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil telah dikenal sebagai pusat dari keanekaragaman hayati, ancaman dari hutan dan keanekaragaman hayati dalam kawasan tersebut dilaporkan sangat tinggi. Berbagai laporan dan penelitian lapangan memberi catatan penting terkait kebakaran, perambahan hutan, penambangan, pencurian sumberdaya, alih tata guna lahan, dan berbagai kegiatan manusia berdampak negatif lainnya terjadi di kawasan tersebut.

Masyarakat desa yang berbatasan dengan kawasan hutan memandang hutan adalah tempat dimana berbagai sumberdaya potensial dapat diperoleh secara gratis, namun dengan cara-cara perolehan yang relative sulit. Pemanfaatan sumberdaya hutan sudah dilakukan secara turun temurun oleh beberapa generasi dalam komunitas yang tinggal di sekitar hutan.

⁴⁰ Hasil wawancara Peneliti dengan Masyarakat Yang Melakukan Pelanggaran oleh Bapak Umar Ama pada tanggal 23 April 2020 di Tasik Serai Barat Kecamatan Talang Muandau.

Menurut Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan XIX Pekanbaru, upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi mengenai pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan terhadap pelaku yang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di kawasan Hutan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil:⁴¹

1. Diupayakan memiliki Sumber Daya Manusia oleh ahli pemetaan yang ada di BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan).
2. Ditambahnya personil dilapangan dikarenakan luasnya kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil.
3. Meminta kepada Kementerian Kehutanan untuk membuat Lahan Cagar Biosfer bisa menjadi Perhutanan Sosial, Hutan Desa, Hutan Masyarakat kemitraan dikarenakan dikarenakan terlanjur dikelola oleh masyarakat tempatan.

Menurut KanitReskrim Polsek Pinggir Polres Bengkalis, upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi mengenai pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan terhadap pelaku yang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di kawasan Hutan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil⁴²

1. Dibentuknya segera Tim khusus yang terdiri dari beberapa Instansi yang berkopoten baik itu Penyidik Kepolisian Sektor Pinggir dan PPNS yang ada dilingkungan wilayah Kabupaten bengkalis yaitu Kehutanan, perkebunan dan Lingkungan Hidup.
2. Tersedianya dana khusus yang disiapkan oleh instansi kehutanan perkebunan dan lingkungan hidup untuk mempercepat penyidikan yang dilakukan sehubungan dengan keterangan ahli yang tidak berada di Provinsi Riau, dimana Kementerian yang mempunyai beberapa instansi dibawahnya yang ada di Propinsi Riau yaitu BPKH IX Pekanbaru dan BKSDA.

⁴¹ Hasil wawancara Peneliti dengan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan XIX Pekanbaru oleh Bapak Muhammad Fadli, ST, pada tanggal 22 April 2020 di Pekanbaru.

⁴² Hasil wawancara Peneliti dengan Kanit Reskrim Polsek Pinggir oleh Bapak IPDA Yopi Ferdian, SH., MSi, pada tanggal 22 April 2020 di Polsek Pinggir.

3. Dilakukanya koordinasi antara penyidikan penuntutan dan peradilan untuk mempercepat sanksi hukum secara tegas sesuai dengan ancaman hukuman yang dimaksud oleh Undang undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menurut Camat Talang Muandau, menurut beliau upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi mengenai pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan terhadap pemanfaatan hutan di kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil yakni dengan mengajukan perubahan status Hutan Cagar Biosfer dikarenakan yang tinggal adalah masyarakat tempatan sehingga mereka dapat memanfaatkan hasil hutan kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.⁴³

Menurut Kepala Desa, upaya yang dilakukan untuk mengatasihambatan yang dihadapi mengenai pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan terhadap pemanfaatan hutan di kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil:

1. Diperlukannya adanya tapal batas kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil.⁴⁴
2. Diberikan sosialisasi kepada masyarakat agar mengetahui masyarakat tempatan bahwa tanah yang dikelola adalah merupakan kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil.⁴⁵
3. Melibatkan perangkat desa dan jajarannya dalam menentukan tapal batas kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil.⁴⁶

Menurut tokoh masyarakat Kecamatan Talang Muandau, upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi mengenai pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan terhadap pemanfaatan hutan di kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil:

⁴³ Hasil wawancara Peneliti dengan Camat Talang Muandau oleh Bapak Drs. Nasrizal, pada tanggal 22 April 2020 di Kecamatan Talang Muandau.

⁴⁴ Hasil wawancara Peneliti dengan Kepala Desa Tasik Serai oleh Bapak Sabar Manurung, pada tanggal 23 April 2020 di Tasik Serai Barat.

⁴⁵ Hasil wawancara Peneliti dengan Kepala Desa Tasik Serai Barat oleh Bapak Ruslan. J, pada tanggal 23 April 2020 di Tasik Serai Timur.

⁴⁶ Hasil wawancara Peneliti dengan Kepala Desa Tasik Serai Timur oleh Bapak Erwin Siahaan, pada tanggal 23 April 2020 di Tasik Serai Timur.

1. Agar dapat dikelola dengan baik oleh masyarakat tempatan dan mengajukan perubahan status lahan yang termasuk kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil.⁴⁷
2. Memberikan kejelasan batas lahan, terutama diantara kawasan konservasi dengan kawasan pemukiman, ladang dan atau lahan dengan status hak kelola lainnya⁴⁸

Kesimpulan

Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan perusakan hutan terhadap pelaku yang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di Kawasan Hutan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil yakni telah mengalami gangguan, baik penebangan liar maupun perambahan lahan untuk pembukaan ladang dan pemukiman dengan demikian hal ini dapat dinilai belum berjalan sebagaimana mesitinya.

Hambatan yang dihadapi mengenai pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan terhadap pelaku yang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di Kawasan Hutan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil yakni terkendalanya oleh ahli pemetaan dimana pemetaan tersebut harus berdasarkan ahli yang ada di BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan) yang disebabkan oleh keterbatasan personil ahli yang ada di BPKH, terkendala dikarenakan luasnya kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil dan juga kekurangan personil dilapangan dalam pemasangan patok kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil, sehingga tidak maksimalnya dalam pelaksanaannya, lahan kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil terlanjur telah dikelola masyarakat pemerintahan setempat, lemahnya pemantauan kegiatan dan pelanggaran masyarakat disekitar hutan, ketidaktahuan masyarakat tempatan selama ini yang dilakukan bahwa tanah yang dikelola dan dijadikan perkebunan serta pemanfaatan hasil hutan tersebut adalah merupakan kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi mengenai pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan terhadap pelaku yang melakukan

⁴⁷ Hasil wawancara Peneliti dengan Tokoh Agama oleh Bapak Hendrik Sitompul pada tanggal 23 April 2020 di Kecamatan Talang Muandau.

⁴⁸ Hasil wawancara Peneliti dengan Lembaga Adat Melayu oleh Bapak Albamin pada tanggal 23 April 2020 di Kecamatan Talang Muandau.

kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di Kawasan Hutan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil yakni diupayakan memiliki Sumber Daya Manusia oleh ahli pemetaan yang ada di Balai Pemantapan Kawasan Hutan, ditambahnya personil dilapangan dikarenakan luasnya kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil, dibentuknya tim khusus untuk penyidikan kasus dibidang kehutanan serta adanya anggaran dari pemerintah, meminta kepada Kementrian Kehutanan untuk membuatkan Lahan Cagar Biosfer bisa menjadi Perhutanan Sosial, Hutan Desa, Hutan Masyarakat kemitraan dikarenakan dikarenakan terlanjur dikelola oleh masyarakat tempatan, dengan mengajukan perubahan status Hutan Cagar Biosfer, diperlukannya adanya tapal batas kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, Bandung: Rineka Cipta, 2012
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum Pidana*, cet. Revisi ke-4, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakkan Hukum Lingkungan Indonesia*, Edisi Revisi, Bandung: PT. Alumni, 2010
- Djanius Djamin, *Pengawasan Dan Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2015.
- Gusti Bagus Arjana, *Geografi Lingkungan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Haris Gunawan, *Melihat Sedekat Mungkin Cagar Biosfer*, Bandung: Refika Cipta, 2012
- Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution*, rev. cet-11, Jakarta: Rajawali Pers, 2012
- Mappatoba Sila, *Perlindungan dan Pengamanan Hutan*, Hasanuddin: Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin, 2012.
- Nandika Dodi, *Hutan Bagi Ketahanan Nasional*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2015.
- Niniek Suparmi, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*, cet. Revisi IV, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- P. A.F. Laminating, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, cet. Revisi III, Bandung: Citra Aditya, 2010
- Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Tahun 2019.
- Pramudianto, Andreas, *Kawasan Cagar Alam dalam Konsep Hukum Global dan Keberadaannya di Indonesia*, Jurnal Lingkungan dan Pembangunan, Vol. 14, No. 1, 2014.
- Suparto Wijoyo, *Hukum Lingkungan, Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan*, Surabaya: Airlangga University Press, 2011
- Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Salman Luthan, *Asas dan Kriteria Kriminalisasi*, Jurnal Hukum Lingkungan, Vol. 16 No. 1 Januari 2016
- Siran S. A., *Pola Pengelolaan Hutan Tropika, Alternatif Pengelolaan Hutan yang Selaras dengan Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Bayu Indra Grafika, 2014

Sutarto, *Encyclopedia Administrasi XXVII*, Jakarta: Gramedia Utama, 2013.

Widjoyo, *Refleksi Mata Rantai Pengaturan Hukum Pengelolaan Lingkungan Secara Terpadu*, Surabaya: Airlangga University Press, 2010

Y. Purwanto dan P.S Ajiningrum, *Journal Lore Lindu; Pengeolaan Kawasan Konservasi Bagi Pembangunan Ekonomi Secara Berkesinambungan*, GDLHUB, Surabaya, 2015,